

Judul : AS-Iran mau mediasi, Komisi I ingin RI ambil posisi tepat
Tanggal : Minggu, 29 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

AS-Iran Mau Mediasi Komisi I Ingin RI Ambil Posisi Tepat



Sukamta

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai Indonesia harus mengambil posisi tepat dan terukur dalam merespons ruang mediasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Langkah itu sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam kondisi saat ini, keterlibatan pihak ketiga sangat dibutuhkan.

Menurutnya, Indonesia harus hadir sebagai honest broker, atau pihak yang dipercaya semua negara yang bertikai, dengan tetap menjaga independensi tinggi. Posisi itu memastikan negara tidak terjebak dalam kepentingan geopolitik tertentu yang merugikan. Karena, netralitas jadi kunci utama dalam menjalankan peran diplomasi yang kredibel.

Sukamta menilai, momentum emas ini harus dimanfaatkan untuk mendorong deeskalasi konflik melalui jalur diplomasi konstruktif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia punya hubungan baik dengan berbagai kekuatan global. "Posisi strategis itu sangat mendukung terciptanya negosiasi perdamaian," ujarnya, kemarin.

Dia mendorong proses mediasi dilakukan melalui pendekatan multilateral dengan

melibatkan lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam. Itu agar proses komunikasi berjalan lebih inklusif dan berkeadilan. Kehadiran organisasi dunia akan memberikan legitimasi pada kesepakatan.

Selanjutnya, hal utama yang harus dikejar adalah bagaimana memilih cara efektif menghentikan potensi eskalasi konflik demi melindungi seluruh warga sipil. Fokus mediator harus tertuju pada pembukaan jalan menuju perdamaian abadi yang berkelanjutan. "Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada ego kekuatan politik dunia," ingatnya.

Dia mengingatkan, pendekatan kemanusiaan harus jadi prioritas utama dalam tiap upaya penyelesaian konflik bersenjata. Karena dampak peperangan ini sangat luas terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah serta keselamatan masyarakat sipil. Seluruh pihak wajib mengedepankan empati dalam mencari solusi damai bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia diharapkan terus memainkan peran aktif dalam mendorong perdamaian dunia melalui diplomasi sejuak. Orientasi pada solusi konkret harus selalu dikedepankan agar ketegangan mereda. "Peran aktif itu adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Muhammad Husein Fadlulloh meyakini, Presiden Prabowo Subianto mampu mendorong penyelesaian konflik internasional lewat jalur dialog. Apalagi, Indonesia memiliki tradisi diplomasi damai yang kuat dan posisi tawar yang diterima baik semua pihak. ■ PYB